

Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam Penanganan Covid-19 Melalui *Collaborative Governance*

Desna Aromatica

FISIP Universitas Andalas

e-mail: desnaaromatica@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya turbulensi pada berbagai sektor. Kegoncangan yang ditimbulkan oleh virus ini bermuara pada tuntutan atas perlunya peran yang maksimal dari pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, dengan memaksimalkan kapasitas yang dimilikinya sebagai organisasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan unit analisis adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Solok melalui Keputusan Bupati Solok nomor 360-412-2020 telah membentuk Satuan Tugas Tingkat Kecamatan di Kabupaten Solok pada tanggal 29 September 2020. Hal yang menarik adalah ternyata pada level Pemerintahan Nagari telah dahulu digagas pembentukan satgas Covid -19 sebagai *quick respons* mereka atas wabah ini sejak bulan Maret 2020. Hal ini menunjukkan bahwa perlu kiranya dibentuk kolaborasi yang kuat dan intens oleh pemerintah Kabupaten hingga level Pemerintah terdepan yaitu Nagari, sehingga dapat menguatkan kapasitas Pemerintah daerah dalam penanganan pandemik ini. Seperti yang dikemukakan oleh Christensen dan Gazley (2008), bahwa kapasitas sangat ditentukan oleh kemampuan infrastruktur, *human resources/leadership*, *financial resources/management*, dan *external environment* yang dimiliki organisasi. Optimalisasi dari berbagai elemen kapasitas ini jika diolah dalam kerangka kolaborasi yang saling mendukung dengan Pemerintah Nagari dengan segenap *indigenous values* dan *Indigenous people* yang dimilikinya dalam konteks *collaborative governance*, akan membantu pemerintah daerah menangani pandemic Covid-19 lebih efektif, sehingga dapat meminimalisir turbulensi yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

Kata Kunci: Kapasitas, Collaborative Governance, Pemerintahan Daerah, Nagari.

Strengthening The Capacity of the Solok District Local Government in Handling Covid-19 Through Collaborative Governance

Abstract

The Covid-19 pandemic has caused turbulence in various sectors. The shock caused by this virus certainly leads to demands for the maximum role of local governments in maintaining the stability of people's lives, by maximizing the capacity they have as a public organization. This study used a qualitative approach, with the unit of analysis being the local government of the Solok district. The local government of the Solok District through the decree of the regent of Solok number 360-412-2020 has formed a sub-district on 29 September 2020. The interesting thing is that it turns out that at the village level. It was initiated to form a Covid-19 task force as a form of their rapid response to this outbreak since March 2020. This shows that it is necessary to form strong and intense collaboration by the district government to the front level government, namely the nagari, in order to form harmonization and unity of action in handling this pandemic. As stated by Christensen and Gazley (2008), that capacity is very much determined by the elements of infrastructure, *human resources/leadership*, *financial resources/management* and *eksternal environment*. The optimization of these various capacity elements it processed in a framework of mutually supportive collaboration with the nagari government with all indigenous values and indigenous people

they have in the context of collaborative governance will help local governments handle the covid-19 pandemic more effectively so that it can minimize the turbulence it causes in life society and government.

Keywords: local government, capacity, collaborative governance, nagari.

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan organisasi mencapai tujuan ditentukan oleh kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi. Penyesuaian diri dengan lingkungan itu dilakukan karena organisasi memiliki sejumlah input yang dapat berguna bagi organisasi, seperti sumberdaya manusia, alam atau bahan mentah. Kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan akan membuat organisasi bertahan menghadapi berbagai persoalan.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan ketidak stabilan dalam segala dimensi kehidupan masyarakat dan Pemerintahan. Pemerintah daerah Kabupaten Solok. Sebagai organisasi publik yang entitasnya adalah untuk melayani masyarakat, memiliki peran penting dan tanggungjawab besar dalam penanganan pandemik ini. Sebagai daerah yang berada diperlintasan jalur lintas sumatera, kabupaten ini tidak pernah berada dizona merah penyebaran covid 19. Berbagai kebijakan dilahirkan untuk penanganan wabah ini. Sebagai Organisasi Publik, Kemampuan Pemerintah daerah dalam penanganan pandemik ini sangat dipengaruhi oleh berbagai elemen yang dimilikinya dalam bekerja. Christensen (2008) menyatakan bahwa Kapasitas organisasi Publik dapat dilihat dari kekuatan yang dimiliki dalam beberapa hal, yaitu *Infrastructure, human resources/leadership, Financial resources/management, external environment*. Penanganan pandemic covid 19 juga menyebabkan alokasi dan pemanfaatan infrastruktur, sumberdaya manusia, keuangan daerah diorientasikan pada penanganan bencana ini.

Meluasnya wabah ini menyebabkan Pemerintah daerah memutuskan untuk tidak bekerja sendiri. Sebagai daerah pertama yang merubah pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan Nagari sejak tahun 2001, maka pelibatan berbagai stake holder dinagari menjadi keputusan tepat. Kolaborasi menjadi suatu kebutuhan dalam penanganan wabah ini. *Collaborative Governance*

antara pemerintah daerah Kabupaten, dan Pemerintah Nagari dengan berbagai unsur masyarakat adat Nagari yang merupakan wilayah dengan komunitas adatnya di Kabupaten Solok, akan menjadi suplemen terhadap penguatan kapasitas Pemerintah daerah Kabupaten dalam penanganan pandemik.

Kabupaten Solok adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang pemerintahannya disebut Nagari. Pemerintahan Nagari merupakan pemerintahan yang masyarakatnya merupakan masyarakat adat dengan elit adat yang memiliki peran kuat ditengah masyarakat. Pelibatan elit adat dalam berbagai kegiatan pemerintahan Nagari adalah kekuatan tersendiri dalam membantu penanganan covid 19 dilevel terdepan. Banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait pandemic covid 19 ataupun collaborative governance, seperti Desna (2019), Syamsurizaldi (2019), mutia (2020), namun penelitian tentang collaborative governance sebagai upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan pandemic covid 19 masih belum banyak dilakukan, terutama kolaborasi dengan Unsur masyarakat adat Nagari seperti *cadiak pandai, tungku tigosajarangan, bundokanduang* serta *Parik paga Nagari*.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Winardi (2015), tuntutan dari lingkungan eksternal seperti wabah covid 19 ini menjadi beban bagi organisasi. Pencapaian tujuan organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi oleh organisasi inilah yang dikenal sebagai kapasitas organisasi. Kapasitas organisasi menurut Donahue dan Hackhauzer (2011), hanya dapat ditingkatkan dengan melakukan *collaborative governance* meskipun sifatnya hanya *ad hoc*, dan perlu perumusan aktivitas atau peran bagi setiap stakeholder dalam penanganan pandemic ini. Braid and Green (2008) menyatakan bahwa ada banyak pihak atau

aktor diluar pemerintah yang memiliki kapasitas lebih dari yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini penanganan covid 19, sehingga perlu bagi pemerintah daerah tetap mengambil peran yaitu menjadi penengah dalam tata kelola pemerintahan dalam penanganan bencana ini. Kolaborasi juga menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, seperti hambatan *culture, institutions, dan politics*.

Keterbatasan kapasitas dapat dikuatkan melalui kolaborasi. Kolaborasi dalam konteks penanganan pandemi covid 19 di Kabupaten Solok yang dilakukan bersama dengan pemerintahan Nagari memiliki beberapa alasan. Pertama, Sebagai garda terdepan yang berhadapan dengan masyarakat, tentu pemerintah nagari menjadi ujung tombak dalam penanganan covid 19. Kedua, nagari adalah sebuah pemerintahan terdepan yang memiliki komunitas adat yaitu *indigenous people* yang terdiri dari tokoh adat seperti *niniak mamak*, alim ulama, *cadiak pandai*. Selanjutnya ada *Tungku tigo sajaranan* sebagai hirarki struktural masyarakat ada yaitu *malin, manti, dubalang dan penghulu adat* yang bernaung dalam satu lembaga yang disebut kerapatan Adat Nagari. Sebagai *gemeinschaft community*, nagari memiliki *value* dan *social structure* yang menjadi kekuatan dalam menyukseskan tujuan kolaborasi. Heckscher dan Adler (2006) menyatakan bahwa *gemeinschaft community* memiliki *value* berupa kesetiaan dan rasa hormat, serta *social structure* yang sangat dipatuhi serta memiliki *identity* yang kuat. Hal ini terlihat dari penanganan covid 19 yang aktif di Nagari-Nagari. Kekuatan utamanya bukan terletak pada persoalan keuangan, karena nagari saat ini memiliki sumber keuangan sendiri yang diarahkan pada penanganan covid 19. Kekuatan kolaborasi ini terletak dari aktivasi dimensi *gemeinschaft community* di nagari.

Komunitas tradisional dan nilai-nilai tradisionalnya perlu dihidupkan kembali dan menjadi bagian penting dalam penanganan wabah ini. Kolaborasi ini dapat dilaksanakan dalam beberapa aspek. Pertama, kolaborasi dalam aspek infrastruktur dan keuangan. Infrastruktur dalam penanganan covid 19 di kabupaten solok dialokasikan dari APBD dimana pada tanggal 30 Agustus 2020 sudah dilakukan refocusing dan relokasi APBD dalam rangka penanganan covid

19. Meskipun telah dilakukan upaya pemenuhan anggaran untuk kebutuhan infrastruktur kesehatan, penanganan covid-19 ini, menyebabkan pemerintah daerah masih mengalami kekurangan dalam ketersediaan infrastruktur. Penggalangan dana dari swadaya masyarakat dan swasta dan perantau hanya mencapai 10 % dari total anggaran yang ada yaitu sekitar 25 -50 milyar. Sayangnya optimalisasi peran perantau belum dimaksimalkan. Pemerintah daerah hendaknya mengagas setiap nagari untuk menggalang bantuan dari perantau sehingga dapat membantu penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan.

Kedua, sumberdaya manusia. Melalui keputusan Bupati Solok nomor 360-411-2020 tentang pembentukan Satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, bulan September 2020, dibentuklah Satgas tingkat Kabupaten. Disisi lain ternyata Pemerintah Nagari sudah terlebih dahulu pada maret 2020, yaitu nagari Koto Baru justru lebih dahulu membentuk relawan satgas efektif percepatan penanganan covid 19 nagari. Satgas dibentuk Berdasarkan keputusan Wali Nagari Koto Baru nomor 100/26/NKTB/SK.WN/2020, dimana tim yg dibentuk terdiri dari Wali Nagari, dan perangkat serta staff, BPN, kepala jorong, kader posyandu, dan kader lain termasuk seperti LINMAS, Bhabinkhamtibmas, babinsa dan pendamping desa. Dari keanggotaan ini tidak dituliskan asal perwakilan keanggotaan satgas sehingga keterlibatan *indigenous people* dan peran elit lokal tidak Nampak. Padahal ini lah kekuatan utama yang seharusnya dirangkul, dimana pemerintah kabupaten memberikan arahan tentang pengaktifan fungsi elit adat sebagai garda terdepan penanganan covid di nagari. Keterlibatan sukarelawan/LSM dari hasil penelitian yang penulis lakukan juga tidak ada. Pemda bahkan kekurangan tim pemulasaran dan pemakaman. Wilayah pemakaman korban covid seyogyanya melibatkan Nagari sebagai pemilik tanah dan tokoh adat sebagai pemilik tanah-tanah ulayat sehingga jika memungkinkan, membantu dalam penyediaan pemakaman.

Pemerintah Kabupaten telah melakukan penyaluran bantuan bahan pangan melalui Kecamatan dan nagari. Dilevel nagari juga telah

dilakukan revisi terhadap APB Nagari dimana APBN diarahkan pada pembelian APD, yaitu Barang medis habis pakai (BMHP), masker dan BLT. Namun menurut pemerintah nagari, bagi nagari yang mengalami nol kasus seyogyanya APB nagari tidak perlu difokuskan maksimal pada hal tersebut.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, perlu dilakukan dan dirancang dengan terstruktur dan menggunakan prinsip *good Collaborative governance*. Hal ini didorong oleh temuan penelitian bahwa masih lemahnya kapasitas organisasi baik infrastruktur, keuangan, sumberdaya manusia. Untuk itu perlu mengaktifkan dengan optimal berbagai element yang ada dalam masyarakat Nagari yaitu *indigenous people*, sehingga menjadi suplemen bagi kapasitas Pemerintah daerah. melalui dimensi Infrastruktur Organisasi, Sumberdaya Manusia, Sumberdaya Keuangan dan manajemen sistem organisasi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

REFERENSI

Christensen, Robert.K.dkk. 2008. *Capacity For Public Administration: Analysis of Meaning and Measurement*. USA: Journal Public Administration and development Vol.28 Willey Interscience

Donahue, John. et al. 2011. *Collaborative Governance Private roles for public goals in Turbulent times*. New Jersey: princeton Press

Frederickson, H.George. et al. (2012). *The Public Administration Theory Primer :Second edition*. Colorado: Westview Press

Gorfner, Harold.F.dkk. (1997). *Organization Theory: a Public Perspective*. USA: Harcourt Brace College

Heckscher, Charles. et al. (2006). *The Fiem as a Collaborative communityReconstructing Trust in the Knowledge economy*. New York: Oxford Press.

Huberman, Miles. 1992. *Penelitian data kualitatif*. Terjemahan Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press

Makmur. (2007). *Patologi Serta Terapannya dalam Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Bandung: Refika Aditama

Thames, Robert.c.dkk. (2009). *Building Organizational Capacity in a Turbulent environment*. Canada: Jhon Willey&Sons,Inc

Winardi,J. (2015). *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta : Prenada Media Group